

ABSTRAK

Agata Delapriyani Asa (20310138) “Deskripsi tentang pertimbangan hakim pengadilan negeri terhadap putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa hakim yang menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima, (2) Mengapa hakim pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim yang menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima dan pertimbangan hakim pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskripsi yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait pertimbangan hakim pengadilan negeri terhadap putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima, yaitu; a. Keberatan Pemohon diajukan lewat waktu (kadaluwarsa). b. Gugatan Mengandung cacat formil.

Pertimbangan Hakim pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen karena: Ketidadaan berkas berupa Putusan BPSK Lubuklinggau dalam perkara *in casu* yang menjadi dasar pemeriksaan keberatan maka permohonan pemohon keberatan menjadi kabur (*obscur libel*). BPSK Kota Medan telah melampaui batas kewenangan absolutnya dalam menangani perkara tersebut. Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah Saran Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Hakim a. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar dapat melihat dengan cermat dan teliti setiap apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam menangani sengketa konsumen sehingga tidak melampaui batas wewenangnya. b. Bagi Hakim agar tetap adil serta menjunjung Tinggi Konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia sehingga tetap terjaga Nilai Integritas Kehakiman

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Putusan BPSK, Sengketa Perlindungan Konsumen*

ABSTRAC

Agata Delapriyani Asa (20310138) "Description of district court judges' considerations regarding BPSK decisions in resolving consumer protection disputes"

The formulation of the problem in this research is (1) Why did the judge declare the applicant's objection request unacceptable, (2) Why did the district court judge cancel the BPSK decision in resolving a consumer protection dispute.

The research objective in this study is to determine the judge's reasons for declaring the applicant's objection request unacceptable and the district court judge's consideration of canceling the BPSK decision in resolving consumer protection disputes. The type of legal research used is normative and descriptive research which seeks to describe or explain actual problems related to district court judges' considerations regarding BPSK decisions in resolving consumer protection disputes.

The judge's reasons district court for declaring the applicant's objection request unacceptable, namely; a. The Petitioner's objection was submitted after time (expired). a. The Lawsuit Contains Formal Defects

The Judge's district court considerations cancel the BPSK decision in a consumer protection dispute because: a. The absence of a file in the form of the Lubuklingau BPSK Decision in the case in casu which is the basis for the objection examination means that the objection applicant's application becomes unclear (obscure libel). b. BPSK Medan City has exceeded the limits of its absolute authority in handling this case. Suggestions that the author can give in writing this are: Suggestions for the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and Judges. a. For the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), to be able to look carefully and carefully at each of its duties and authorities in handling consumer disputes so that they do not exceed the limits of their authority. b. For judges to remain fair and uphold the Constitution in force in the Republic of Indonesia so that the Value of Judicial Integrity is maintained

Keywords: Judge's Consideration district court, BPSK Decision, Consumer Protection Dispute